

UPAYA MEMBERDAYAKAN PUSTAKAWAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Iskandar Sulaiman

Pustakawan Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Sesuai dengan judulnya, topik tulisan ini mengangkat masalah tentang berbagai upaya yang telah dan mungkin dapat dilakukan untuk memberdayakan peran pustakawan dalam menunjang berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan. Bagaimanapun perlu disadari bahwa kecenderungan mutu pendidikan kita yang semakin terpuruk dari tahun ketahun sebenarnya sangat terkait dengan lemahnya faktor penunjangnya, khususnya perpustakaan. Menciptakan perpustakaan yang baik dan yang mampu menunjang berbagai aktifitas belajar mengajar di sekolah karenanya menjadi suatu keharusan. Diskusi pada tulisan ini adalah membahas tentang berbagai hal untuk memberdayakan peran pustakawan sebagai faktor yang paling dominan bagi terciptanya perpustakaan yang representatif untuk tujuan mencerdaskan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena itu pengidentifikasian terhadap berbagai kendala yang dihadapi para pustakawan dan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya serta karir mereka merupakan bahasan utama dalam tulisan ini.

Pendahuluan

Karya para ilmuwan yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang sesuai dengan tuntutan tingkat kebutuhan umat manusia. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II ditekankan pada penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Prabowo Tjitropranoto, 1995).

Dalam rangka menciptakan inovasi baru untuk kepentingan pembangunan, para ilmuwan dalam bidangnya masing-masing membutuhkan informasi ilmiah yang cepat, tepat dan terkini sebagai bahan rujukan. Kemampuan para ilmuwan dan pelaksanaan pembangunan untuk mendapatkan / mengumpulkan informasi ilmiah yang terbit dalam berbagai media informasi sangat terbatas, karena jumlah informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai ilustrasi di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Agama . (Litbang Agama) setiap tahun menghasilkan + 7.000 dokumen hasil penelitian (Tisyo Haryono, 1992). Bayangkan berapa

banyak dokumen yang dihasilkan oleh setiap lembaga dan masing-masing Departemen dan yang dihasilkan oleh non departemen dan swasta di Indonesia. Lebih rumit lagi kalau menghitung jumlah dokumen yang dihasilkan oleh setiap negara. Tahun 1982 jumlah majalah yang diterbitkan \pm 50.000 judul (Pawit M. Yusup, 1994). Apabila setiap judul majalah diterbitkan 3 (tiga) nomor pertahun dan setiap nomor memuat 4 artikel ilmiah, maka pada tahun 1982 sudah ada + 600.000 artikel karya ilmiah, tentunya sampai dengan tahun 2000 jumlahnya sangat banyak.

Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatannya dalam pembangunan, serta kebutuhan para ilmuwan dan cendekiawan untuk pengembangan lebih lanjut, menempatkan peranan pustakawan menjadi lebih strategis karena tugas dan fungsi perpustakaan pada umumnya adalah mengadakan, mendayagunakan dan melestarikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu perkembangan teknologi informasi seperti teknologi komputer dan teknologi komunikasi sangat mendukung pustakawan meningkatkan peranannya dalam mendayagunakan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan sekaligus melaksanakan kegiatan fungsional pustakawan.

Peluang yang sangat menguntungkan bagi pustakawan dalam meningkatkan dayaguna informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan kariernya melalui Jabatan Fungsional Pustakawan, tampaknya masih sangat terbatas. Keterbatasan pustakawan dapat disimak dari kelompok masyarakat yang mempertanyakan peranan pustakawan sekarang ini, dalam upaya mendayagunakan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat waktu dan tepat guna.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengemukakan kendala yang dihadapi oleh pustakawan dalam melaksanakan kegiatan fungsional pada umumnya, dan khususnya upaya pendayagunaan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh sebagai upaya memberdayakan pustakawan. Permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, pada umumnya berdasarkan literature dan pengamatan penulis pada beberapa perpustakaan di lingkungan Departemen Agama.

Upaya pustakawan untuk mendayagunakan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan kariernya melalui jabatan fungsional ternyata mengalami berbagai kendala. Kendala yang ada tidak saja faktor dari luar (external) akan tetapi juga faktor internal pustakawan dan perpustakaan.

1. Faktor internal

a. Pustakawan

Faktor internal menyangkut bidang keahlian / skill yang harus dimiliki oleh pustakawan agar mampu dan dapat mengembangkan kariernya melalui jalur fungsional. Sebenarnya keahlian yang harus dimiliki oleh pustakawan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: 33 tahun 1998, bahwa persyaratan untuk diangkat menjadi pejabat pustakawan minimal berpendidikan D-II bidang perpustakaan dan atau D-II bidang lain ditambah dengan kursus penyeteraan bidang perpustakaan yang disekenggarakan oleh PERPUSNAS. Dengan latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan dan bidang tertentu, pustakawan minimal dapat mengimbangi kebutuhan pengguna yang bergerak dalam berbagai disiplin ilmu.

Disamping latar belakang pendidikan, pustakawan perlu memiliki kemampuan lain seperti dikemukakan Prabowo Tjitropranoto (1995) antara lain :

- Memiliki kemampuan berkomunikasi sehingga dapat dengan mudah mengidentifikasi keperluan pengguna informasi.
- Dapat berbahasa asing, terutama bahasa Inggris sehingga mempermudah hubungan internasional.
- Memiliki kemampuan mengembangkan teknik dan prosedur kerja dalam bidangnya.
- Mampu melaksanakan penelitian dibidang perpustakaan untuk menentukan inovasi baru sebagai alternatif pemecahan masalah berdasarkan kajian, analisis atau penelitian ilmiah.

Keahlian dan kemampuan seperti di atas belum banyak dimiliki pustakawan di berbagai perpustakaan yang ada, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus. Dari daftar urutan kebutuhan pustakawan, kebutuhan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dibidang perpustakaan menjadi prioritas utama (Hermandono, 1994). Daftar urutan prioritas kebutuhan ini dapat dijadikan dasar ilustrasi, bahwa kemampuan pustakawan perlu ditingkatkan.

Di lingkungan Departemen Agama diangkat 184 Pejabat pustakawan dengan proses impasing tahun 1990 sampai dengan September 1992 dan sampai dengan Juni 2000 tinggal 131 orang. Dari 184 orang pejabat pustakawan tersebut 15% yang berpendidikan perpustakaan / informasi / dokumentasi. Akibatnya, 45 orang kesulitan memperoleh angka kredit dan dibebaskan sementara. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian pustakawan masih perlu ditingkatkan baik dalam bidangnya maupun bidang lain.

Keahlian dibidang tertentu sangat mempengaruhi ketepatan pustakawan dalam menyajikan informasi ilmiah kepada pengguna. Etty Andriaty (2000),

menyatakan perbedaan antara hasil penelusuran oleh penelusur (pustakawan) yaitu 20 judul dengan jumlah dokumen yang dipilih pengguna dari hasil penelusuran tersebut yaitu 10 judul disebabkan oleh perbedaan spesialisasi.

Prosedur kerja juga merupakan faktor internal pustakawan. Pada umumnya sebagian besar pustakawan tidak menggunakan Rencana Kerja Operasional Terinci (RKOT) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan fungsional pustakawan. RKOT sangat penting karena dapat menjadikan pustakawan lebih produktif. Dalam RKOT sudah ada target hasil kegiatan yang akan dicapai, jadwal pelaksanaan, tenaga pustakawan yang akan melaksanakan butir-butir kegiatan yang tercantum dalam RKOT, dan biaya yang diperlukan (bila diperlukan). RKOT ini dibuat setiap tahun anggaran, dan setiap triwulan diadakan evaluasi oleh pimpinan perpustakaan secara terbuka dalam pertemuan khusus. Untuk keperluan evaluasi dan perolehan angka kredit, pustakawan diwajibkan mencatat hasil kegiatan dalam buku catatan harian yang disediakan seluruh staf dan pejabat fungsional.

Kurangnya kemampuan/keahlian pustakawan, dan lemahnya prosedur serta metode kerja merupakan kendala bagi pustakawan untuk melaksanakan kegiatan jabatan pustakawan dan mendayagunakan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada khususnya.

b. Perpustakaan

Menurut jenisnya perpustakaan ada yang disebut perpustakaan umum dan ada pula yang disebut perpustakaan khusus. Jenis perpustakaan pada umumnya menunjukkan tugas pokoknya dalam menunjang misi organisasi induknya, dan masyarakat yang akan menggunakan jasa perpustakaan tersebut. Akan tetapi fungsi semua jenis perpustakaan pada umumnya adalah sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Perpustakaan Nasional (1992), fungsi perpustakaan adalah sebagai pusat informasi, pusat edukasi, pusat rekreasi, pusat dokumentasi serta pusat konservasi bahan pustaka.

Berdasarkan tugas dan fungsi perpustakaan yang pada umumnya mengelola, mendayagunakan serta melestarikan bahan pustaka maka setiap Birokrasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta memiliki perpustakaan. Birokrasi merupakan model organisasi normatif yang menekankan struktur dalam sebuah organisasi. Hal ini memberikan suatu pengertian bahwa adanya pengaturan rasional dari aktivitas bersama dan merupakan prosedur yang harus dilalui dalam proses penyesuaian suatu kegiatan. Untuk memperoleh hasil kegiatan yang maksimum diperlukan karakteristik birokrasi seperti pembagian kerja yang jelas, program rasional dalam mencapai tujuan, adanya

sistim prosedur kerja, adanya hak dan kewajiban para pemegang jabatan, dan hubungan kerja yang harmonis.

Karakteristik seperti diatas tidak terlihat dengan jelas pada struktur organisasi perpustakaan, terutama mengenai pembagian kerja, hak dan kewajiban struktural dan fungsional. Hal demikian mungkin disebabkan karena status perpustakaan dalam struktur organisasi induknya tidak jelas. Hal ini tidak perlu terjadi karena ada jabatan fungsional pustakawan. Dengan adanya jabatan fungsional pustakawan, maka dalam struktur organisasi perpustakaan dan/atau organisasi induknya dapat dicantumkan Kelompok Pustakawan, yang lazim disebut "**Sarang tawon**". Adanya "**Sarang tawon**" Kelompok Pustakawan maka uraian tugas struktural dan fungsional dapat terlihat jelas, demikian juga hak dan kewajiban pejabat struktural dan pejabat fungsional.

Pustakawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila didukung oleh sarana dan dana yang memadai baik kuantitas maupun kualitas. Penggunaan teknologi komputer di perpustakaan sangat membantu pustakawan karena dapat mempercepat penemuan kembali informasi, memperlancar proses pengolahan, pengadaan bahan pustaka, dan komunikasi antar perpustakaan, serta lebih menjamin data administrasi dalam pengelolaan perpustakaan (Ariarti Tyasdjaja, 1999). Sayangnya perpustakaan yang memiliki sarana canggihnya sangat terbatas. Dilingkup Badan Penelitian dan Pengembangan hanya 40% perpustakaan yang menggunakan komputer (Sulasturi Sophia, 1997). Bahkan masih ada perpustakaan yang tidak memiliki sarana yang sangat diperlukan seperti rak buku, mesin fotokopi dan meja kursi untuk pengguna perpustakaan (Prabowo Tjitropranoto, 1992). Kondisi seperti ini masih dijumpai di beberapa perpustakaan, terutama perpustakaan yang berada pada organisasi induk yang eseloneringnya lebih rendah.

Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya memerlukan dana, demikian juga halnya dengan perpustakaan terutama untuk dana pengadaan koleksi dan layanan perpustakaan dalam jumlah yang cukup besar. Pada perpustakaan besar seperti PUSTAKA, Perpustakaan Nasional, Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia, Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, dana mungkin tidak lagi menjadi masalah, akan tetapi bagi perpustakaan kecil seperti perpustakaan sekolah dan perpustakaan yang berada pada unit kerja eselon IV ke bawah, dana untuk operasional perpustakaan sangat terbatas. Disamping itu penggunaan dana untuk kegiatan perpustakaan kadang kala tidak mudah, karena ada tanggapan bahwa kegiatan perpustakaan bukan merupakan kebutuhan yang mendesak (Zulfikar Zen, 1995). Hal seperti ini sudah pasti akan menghambat proses pelaksanaan tugas pustakawan yang berkaitan dengan pendanaan.

Perpustakaan dapat berfungsi dengan baik apabila memiliki koleksi yang cukup, baik jumlah maupun kualitas. Keberadaan koleksi di perpustakaan juga merupakan salah satu lahan bagi pustakawan untuk memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan dalam jabatan fungsional. Jumlah koleksi yang banyak belum tentu bermanfaat bagi masyarakat pengguna, karena mungkin ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan koleksi perpustakaan sangat tergantung pada jenis perpustakaan, koleksi perpustakaan umum berbeda dengan koleksi perpustakaan khusus, dan juga koleksi perpustakaan universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Disamping itu, pustakawan yang profesional sangat diperlukan untuk menyeleksi koleksi yang diperlukan, sehingga koleksi yang diadakan sesuai kebutuhan masing-masing jenis perpustakaan dan masyarakat yang akan menggunakan perpustakaan tersebut. Agus Dwi Waluyo (1997), menyatakan pemilihan bahan pustaka hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan (*needs and demands*) dari masyarakat yang dilayani serta disesuaikan dengan tujuan dan fungsi perpustakaan.

Keterbatasan dana mengakibatkan pengembangan koleksi di beberapa perpustakaan hanya tergantung pada hasil penukaran dan hadiah. Kadangkala untuk pengembangan koleksi dengan cara penukaranpun tidak dapat dilakukan karena perpustakaan tidak mempunyai terbitan untuk dijadikan modal bahan tukar. Pengadaan koleksi dengan dana yang terbatas, sering terjadi proses pengadaannya tidak terseleksi dengan baik, bahkan bias terjadi pengadaan berdasarkan atas selera pimpinan unit kerja tanpa memperhatikan keperluan pengguna.

Dalam hal jasa perpustakaan, pustakawan belum menemukan bentuk jasa perpustakaan yang betul-betul memenuhi kebutuhan pengguna. Jasa perpustakaan yang ada hanya berkisar pada penyajian data bibliografi seperti indeks, bibliografi, daftar isi majalah dan informasi terseleksi yang memuat abstrak dari informasi tersebut. Dalam era globalisasi saat ini, pengguna pada umumnya penuh dengan kesibukan, tentunya waktu untuk mengunjungi perpustakaan dalam rangka memperoleh informasi primer hampir tidak ada. Disamping itu, pengguna menginginkan informasi lengkap dalam bentuk satu paket utuh dan mendalam keterkaitan disiplin satu dengan disiplin lain. Dibidang agama misalnya, paket informasi spesifik lokasi untuk komoditas tertentu, berdasarkan penelitian mulai dikembangkan. Ternyata jasa paket informasi spesifik lokasi mendapat tanggapan positif dari para peneliti dan penyuluh di lingkungan Badan Litbang Agama. Sayangnya, bobot angka kredit untuk informasi spesifik belum tercantum, mungkin termasuk dalam kelompok "informasi teknis" yang bobot angka kreditnyaupun kecil hanya 0,135 (Pustakawan Madya). Padahal untuk menyusun paket informasi ini tidak semua tingkat jenjang

fungsional dapat melakukannya kecuali pustakawan subjek spesialis dalam bidangnya.

Upaya lain untuk dapat meningkatkan jasa perpustakaan adalah dengan meningkatkan hubungan kerjasama antara perpustakaan. Sebenarnya kerjasama perpustakaan dibidang jasa dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi komputer. Tetapi tidak semua perpustakaan menggunakan teknologi komputer.

Secara keseluruhan yang dikemukakan di atas merupakan faktor internal yang menjadi kendala bagi pustakawan dalam meningkatkan dayaguna informasi ilmu dan teknologi, serta pelaksanaan kegiatan fungsional pustakawan pada umumnya.

2. Faktor External

Pandangan masyarakat terhadap profesi pustakawan masih kurang. Masyarakat sering menganggap bahwa pekerjaan perpustakaan dapat dilakukan semua orang tanpa diperlukan kemampuan khusus. Disamping itu dalam segi pengembangan perpustakaan dan pembinaan karier pustakawan kurang mendapat perhatian pimpinan baik pimpinan perpustakaan maupun pimpinan unit kerja dimana perpustakaan dan pustakawan menjadi tanggung jawabnya. Hal ini tedihat dari alokasi sumberdaya untuk perpustakaan selalu berada pada prioritas terbawah, sama halnya dengan pembinaan karier pustakawan. Kurang penghargaan terhadap profesi pustakawan dan perhatian pimpinan terhadap pengembangan perpustakaan serta pengembangan karier pustakawan, merupakan kendala bagi pustakawan untuk memberdayakan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta melaksanakan kegiatan fungsional pustakawan.

Kesimpulan

Sebagian pustakawan kurang memiliki kemampuan / keahlian dalam bidangnya, dan ini menjadi hambatan bagi mereka untuk dapat melakukan tugas fungsionalnya. Kendala lain adalah keterbatasan sarana, dana perpustakaan, serta keterbatasan koleksi perpustakaan baik jumlah maupun kualitas. Disamping itu, informasi yang disajikan oleh pustakawan untuk pengguna kebanyakan tidak layak digunakan. Hal ini disebabkan karena pustakawan tidak memiliki keahlian di bidang tertentu. Kurang jelasnya status perpustakaan dalam organisasi induknya dan uraian tugas struktural dan fungsional mengakibatkan kaburnya hak dan tanggung jawab pejabat struktural dan pejabat fungsional pustakawan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Kepedulian pimpinan terhadap perkembangan

perpustakaan dan pembinaan karier pustakawan melalui jabatan fungsional pustakawan masih dirasakan kurang.

Saran

Upaya memberdayakan pustakawan agar lebih mapan dalam mendayagunakan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan, serta mengembangkan kariernya melalui jalur fungsional pustakawan perlu dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Pimpinan instansi induk yang terkait memberikan kesempatan kepada pustakawan untuk meningkatkan kemampuan, baik melalui kursus maupun mengikuti program pendidikan di perguruan tinggi.
2. Dalam struktur organisasi induk uraian tugas perpustakaan harus jelas keberadaannya. Dengan demikian penyediaan sarana dan dana untuk operasional perpustakaan dapat terpenuhi.
3. Koleksi perpustakaan perlu dikembangkan baik jumlah maupun mutu / kualitas, karena koleksi merupakan lahan bagi pustakawan untuk memperoleh angka kredit.
4. Perhatian pimpinan terkait terhadap pengembangan perpustakaan dan pembinaan profesi pustakawan perlu ditingkatkan.
5. Perpustakaan Nasional R.I. sebagai lembaga pembina perpustakaan di seluruh Indonesia, hendaknya merumuskan kebijakan yang menetapkan status perpustakaan dalam struktur organisasi, baik organisasi perpustakaan itu sendiri maupun dalam organisasi induknya.

DAFTAR BACAAN

Andriaty, Etty

Strategi penelusuran informasi pada pangkalan data CAB Abstract.

Jurnal Perpustakaan Pertanian, 9 (1), 2000; p.1

Haryono, Tisyo

Kerjasama antar perpustakaan.

Majalah IPI, 12 (1-2), 1990; p.27

Sophia, Sulastub

Tantangan bagi Pustakawan dan perpustakaan pertanian dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Jurnal Perpustakaan Pertanian, IV (1), 1997; p.19

Tjitropranoto, Prabowo

Penelitian dan sumber daya manusia dibidang perpustakaan.

Jurnal Perpustakaan Pertanian, IV (1), 1995; p.1.

Tjitropranoto, Prabowo

Sistim pembinaan perpustakaan khusus dan masalahnya.

Jurnal Perpustakaan Pertanian I (1), 1992; p.6.

Tyasdjaja, Ariarti

Pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap tugas perpustakaan.

Jurnal Perpustakaan Pertanian, 8 (1), 1999; p. 2.

Yusuf, Pawit M.

Ilmu perpustakaan dan profesi Pustakawan peranannya dalam era informasi.

Pembimbing Pembaca, XIII (3), 1994; p. 125.

